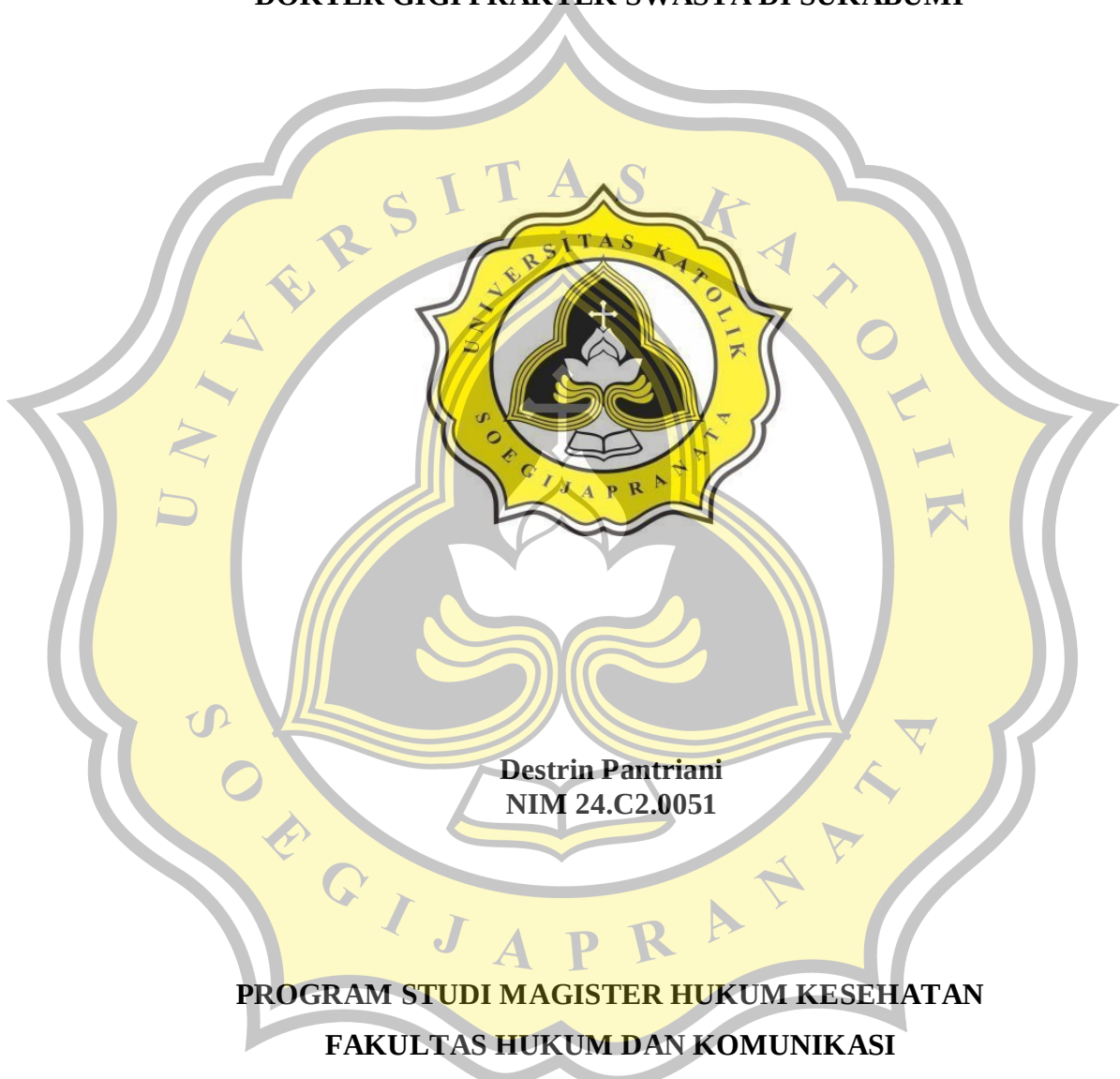


TESIS
PELAKSANAAN PERJANJIAN PADA TINDAKAN KEDOKTERAN GIGI
ESTETIK DAN KEDOKTERAN GIGI TERAPEUTIK PADA KLINIK
DOKTER GIGI PRAKTEK SWASTA DI SUKABUMI



Destrin Pantriani
NIM 24.C2.0051

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PADA TINDAKAN KEDOKTERAN GIGI
ESTETIK DAN KEDOKTERAN GIGI TERAPEUTIK PADA KLINIK
DOKTER GIGI PRAKTEK SWASTA DI SUKABUMI**

T E S I S

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh :
Destrin Pantriani
NIM 24.C2.0051

Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Pergeseran kebutuhan pasien dari pelayanan kedokteran gigi yang bersifat terapeutik menuju tindakan yang bersifat estetik membuat hubungan hukum antara dokter gigi dan pasien semakin kompleks oleh karena pada tindakan yang bersifat estetik lebih berpotensi menimbulkan gugatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana perjanjian antara dokter gigi dan pasien, bagaimana perjanjian tersebut dilaksanakan dalam tindakan kedokteran gigi yang bersifat estetik dan terapeutik, dan bagaimana akibat hukum apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua pihak yaitu dokter gigi dan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yang dilakukan melalui studi kepustakaan pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum kesehatan serta studi lapangan melalui wawancara dengan dokter gigi praktik swasta di Sukabumi, organisasi profesi, dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pada tindakan kedokteran gigi estetik dan terapeutik adalah sesuai dengan ketentuan hukum, standar proesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta kode etik kedokteran gigi. Pelaksanaan perjanjian dalam hal ini berupa pemberian *informed consent* belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal, baik dari aspek cakupan informasi maupun kepatuhan terhadap pelaksanaannya. Akibat hukum apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua pihak akan menimbulkan tanggung jawab hukum baik secara etik, administrasi, perdata serta tanggung jawab secara pidana.

Kata kunci: tindakan kedokteran gigi estetik, tindakan kedokteran gigi terapeutik, perjanjian, tanggung jawab hukum.

ABSTRACT

The shift in patient needs from therapeutic dental care toward aesthetic procedures has made the legal relationship between dentists and patients increasingly complex because aesthetic procedures are more likely to give rise to lawsuits. The research question is: how the agreement between dentists and patients, as well as how such agreements are implemented in both aesthetic and therapeutic dental procedures, and also the legal consequences if the rights and obligations of both parties—the dentist and the patient—are not fulfilled. The research method used is empirical jurisprudence and a descriptive-analytical research specification, conducted through a literature review of laws and regulations and health law literature, as well as field studies via interviews with private practice dentists in Sukabumi, professional organizations, and legal experts. The results of the study indicate that agreements regarding aesthetic and therapeutic dental procedures are in accordance with legal provisions, professional standards, service standards, standard operating procedures, and the code of ethics for dentistry. The implementation of the agreement in this case—specifically, the provision of informed consent—has not yet been fully optimized, both in terms of the scope of information provided and compliance with its implementation. Legal consequences arising from the failure to fulfill the rights and obligations of both parties will result in legal liability, including ethical, administrative, civil, and criminal liability.

Keywords: *aesthetic dental procedures, therapeutic dental procedures, agreements, legal liability.*